

## **Reconstruction Law Police Discretion In Law Enforcement Against Peaceful Settlement of Traffic Accidents Based Value of Justice**

**Mukhtaruddin<sup>\*)</sup>**

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.<sup>\*)</sup>**

**Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum.<sup>\*\*)</sup>**

### **ABSTRACT**

In law enforcement criminal case settlement of traffic accidents through the application of police discretion after the peace between the parties. But in Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation, non penal policy after the peace between the victim with the offender entirely unregulated. In this law, peace can not be used as an excuse to end the case of traffic accidents. Each occurrence of traffic accident cases should be processed in accordance with the applicable law on criminal procedure.

This study aims to determine the existence of a peaceful solution of traffic accidents in law enforcement, police discretion in enforcing the law against the peaceful settlement of traffic accidents, as well as formulating legal reconstruction of police discretion in enforcing the law against the peaceful settlement of traffic accidents based on the values of justice.

This study is normative and empirical. Normative by analyzing the problems and research through the approach to the principles of law and refers to the legal norms contained in the legislation. Empirical approach used in this study is to look at the behavior of law as behavior patterns of society and seen as a social force. The results of the study concluded that the adoption of the discretion of the police in enforcing the law against the peaceful settlement of traffic accidents, based on Law No. 22 of 2009 is not the mechanism prescribed in the law, the clash against the value of the rule of law, the absence of legal protection for formal towards the implementation of restorative justice in conducting police discretion in the case of a traffic accident that restorative justice efforts would have been no legal certainty. In connection with the lack of peace in the peaceful settlement of traffic accidents, to reinforce the authority of discretion in law enforcement, it is necessary to be reconstructed Article 230 of Law Number 22 Year 2009: Case traffic accidents as referred to in Article 229 paragraph (2), (3), and paragraph (4) is processed by the criminal court proceedings in accordance with the provisions of the legislation. By adding one paragraph which states: In the event of a peace / mediation penal remove the right demanded by the criminal court proceedings as referred to in Article 230 (1).

---

<sup>\*)</sup> Law Student Doctoral Program Sultan Agung Islamic University

<sup>\*\*)</sup> Promoters and co promoter Law Student Doctoral Program Sultan Agung Islamic University

# **Rekonstruksi Hukum Diskresi Kepolisian Dengan Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Secara Damai Kecelakaan Lalu Lintas**

**Mukhtaruddin \*)**

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. \*)**

**Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum. \*\*)**

## **ABSTRAK**

Dalam penegakan hukum penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui penerapan diskresi kepolisian setelah adanya perdamaian antar para pihak. Namun dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kebijakan non penal setelah terjadi perdamaian antara korban dengan pelaku sama sekali tidak diatur. Dalam undang-undang ini, perdamaian tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengakhiri perkara kecelakaan lalu lintas. Setiap terjadinya perkara kecelakaan lalu lintas harus diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi penyelesaian secara damai kecelakaan lalu lintas terhadap penegakan hukum, diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyelesaian secara damai kecelakaan lalu lintas, serta merumuskan rekonstruksi hukum diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyelesaian secara damai kecelakaan lalu lintas berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris. Yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat perilaku hukum sebagai pola perilaku masyarakat dan terlihat sebagai kekuatan sosial.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Penerapan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyelesaian secara damai kecelakaan lalu lintas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bukan mekanisme yang diatur dalam undang-undang tersebut, benturan terhadap nilai kepastian hukum, belum adanya payung hukum formil terhadap penerapan *restorative justice* dalam melakukan diskresi kepolisian pada kasus kecelakaan lalu lintas sehingga upaya *restorative justice* tidak akan memiliki nilai kepastian hukum. Sehubungan dengan adanya perdamaian dalam penyelesaian secara damai kecelakaan lalu lintas, untuk mempertegas kewenangan diskresi dalam penegakan hukum, maka perlu direkonstruksi Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan menambah 1 ayat yang menyatakan: Dalam hal terjadinya perdamaian/mediasi penal menghapuskan kewenangan menuntut dengan acara peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 (1).

---

\*) Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

\*\*) Promotor dan Co Promotor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan